

## PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH

**Miftakhudin**

Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah  
udintyas@gmail.com

DOI : <http://doi.org/10.37730/edutrained.v8i2.306>

Diterima: 30 Januari 2024 | Disetujui: 05 Desember 2024 | Dipublikasikan: 11 Desember 2024

### Abstrak

Kajian ini mendeskripsikan peran Kementerian Agama (Kemenag) dalam mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah melalui dua pendekatan utama: pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta implementasi program wakaf. Kementerian Agama melalui program Kantor Urusan Agama Pemberdayaan Ekonomi Umat (KUA PEU) yang merupakan program pendampingan dan penguatan akses pemberdayaan ekonomi umat berbasis keluarga/komunitas yang terdiri dari pemberian bantuan pemberdayaan ekonomi umat, pelatihan, *workshop* usaha serta pendampingan usaha terhadap pengusaha UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi. Kemudian melalui Program Inkubasi Wakaf Produktif, Program yang merupakan wahana transformasi pembentukan sumberdaya manusia nazhir menjadi sumber daya manusia yang mempunyai jiwa usaha yang kreatif. Inovatif dan visioner. Nazhir penerima bantuan akan mendapatkan akses permodalan, pelatihan dan pendampingan. Meskipun dihadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran terhadap wakaf, strategi edukasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan diidentifikasi sebagai faktor kunci untuk keberlanjutan dan perluasan program. Rekomendasi mencakup peningkatan kesadaran, penguatan kolaborasi, dan pengembangan lebih lanjut program pemberdayaan UMKM untuk dampak yang berkelanjutan. *Policy paper* ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran Kemenag dalam pengentasan kemiskinan, mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi dengan prinsip-prinsip keagamaan.

**Kata Kunci:** Kementerian Agama, Pengentasan Kemiskinan, Jawa Tengah, UMKM, Wakaf

### Abstract

*This study describes the role of the Ministry of Religious Affairs (MoRA) in alleviating poverty in Central Java through two main approaches: the empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and the implementation of the waqf program. The Ministry of Religious Affairs through the Office of Religious Affairs for the Economic Empowerment of the Ummah (KUA PEU) program, which is a program of assistance and strengthening access to family/community-based community economic empowerment consisting of providing assistance for community economic empowerment, training, business workshops and business assistance to MSME entrepreneurs, has contributed significantly to improving economic welfare. Then through the Productive Waqf Incubation Program, a program that is a vehicle for transforming the formation of nazir human resources into human resources who have a creative business spirit. Innovative and visionary. Nazirs receiving assistance will get access to capital, training and mentoring. Despite challenges, such as low awareness of waqf, education strategies and collaboration with stakeholders were identified as key factors for the sustainability and expansion of the program. Recommendations include raising awareness, strengthening collaboration, and further developing the MSME empowerment program for sustainable impact. this policy paper provides a comprehensive understanding of MoRA's role in poverty alleviation, integrating economic empowerment with religious principles.*

**Keywords:** Ministry Of Religious Affairs, Poverty Alleviation, Central Java, MSME, Wakaf



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang beragam budaya dan agama, memiliki tantangan kompleks terkait pengentasan kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi semata, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, dan agama. Salah satu provinsi yang menjadi fokus kajian ini adalah Jawa Tengah, yang terletak di pusat pulau Jawa. Provinsi ini memiliki keberagaman masyarakat yang kaya, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan pembangunan, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah serius yang terus menjadi perhatian utama pemerintah di Indonesia. Meskipun berbagai program dan kebijakan telah diterapkan, namun realitas kemiskinan masih menyisakan sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Fenomena ini menciptakan kebutuhan untuk memahami dan menganalisis peran berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama, dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.

Dalam konteks ini, Kementerian Agama menjadi lembaga yang memiliki potensi besar untuk turut berkontribusi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Keberadaan Kementerian Agama tidak hanya terkait dengan aspek keagamaan, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan yang bersentuhan dengan aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat (Lubis E. A., 2023). Dalam hal ini, kajian ini akan membahas secara khusus peran Kementerian Agama dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah No. 41/07/33/Th.XVIII, 1 Juli 2024 tentang Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Maret 2024 disebutkan persentase penduduk miskin maret 2024 adalah 10,47 persen, turun 0,30 persen dibanding Maret 2023 yang sebesar 10,77 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024).

Rumusan masalah kajian ini adalah bagaimana Kementerian Agama dapat

efektif berperan dalam mengatasi ketidakmerataan distribusi kesejahteraan, memahami dan menanggapi faktor budaya serta agama yang memengaruhi tingkat kemiskinan, serta mengatasi hambatan literasi dan pendidikan masyarakat untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah.

Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis peran Kementerian Agama dalam mengurangi ketidakmerataan distribusi kesejahteraan di Jawa Tengah, memahami dan merumuskan langkah-langkah responsif terhadap faktor budaya dan agama yang memengaruhi tingkat kemiskinan, serta mengembangkan strategi efektif untuk mengatasi hambatan literasi dan pendidikan masyarakat guna mencapai pengentasan kemiskinan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peran Kementerian Agama dalam konteks pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi ketidakmerataan distribusi kesejahteraan, pengaruh budaya dan agama, serta hambatan literasi masyarakat akan memperkaya kerangka teoritis di bidang kebijakan pembangunan. Kajian ini juga dapat menjadi landasan bagi kajian selanjutnya yang lebih mendalam terkait interaksi antara aspek-aspek keagamaan dan pembangunan sosial-ekonomi.

Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan panduan konkret bagi Kementerian Agama dalam merancang kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi implementasi program yang lebih efektif dan relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Selain itu, temuan kajian ini juga dapat memberikan wawasan bagi pihak terkait, termasuk organisasi non-pemerintah dan pihak swasta, dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan dengan mempertimbangkan aspek-aspek

keagamaan dan budaya secara holistik. Dengan demikian, kajian ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

## KAJIAN PUSTAKA

Kajian dari (Lubis, Silalahi, & Irama, 2022) mengulas peran Kementerian Agama dalam menggerakkan program pemberdayaan amil zakat di Provinsi Sumatera Utara. Hasil kajian memberikan gambaran tentang sejauh mana efektivitas Kementerian Agama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan melalui pendekatan pemberdayaan. Kajian dari (Sastika & Batubara, 2023) menginvestigasi implementasi program pemberdayaan ekonomi oleh lembaga keagamaan di Desa Mahato. Temuan kajian menyoroti dampak positif dan tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kajian (Wahid, 2023) membahas interaksi antara pendidikan keagamaan dan upaya penanaman kesadaran sosial dalam meminimalkan isu kemiskinan. Kajian ini memberikan wawasan mengenai peran pendidikan keagamaan dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap kemiskinan. (Isman, 2021) memfokuskan pada dampak program pemberdayaan perempuan yang diinisiasi oleh lembaga keagamaan di komunitas keagamaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dapat menjadi pendorong penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat. Kajian dari (Sintasari, 2021) mencermati berbagai inovasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan remaja. Kajian ini memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas kebijakan pemberdayaan masyarakat dan potensi peran Kementerian Agama dalam mengimplementasikannya pada

kelompok remaja masjid. Kajian dari (Ariawan, 2024) membahas tentang peran Kementerian Agama dalam pengentasan kemiskinan Ekstrem di Bali dengan menekankan bahwa peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta program/bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui pemanfaatan *Dana Punia Hindu* untuk bantuan pendidikan dan penguatan *Pasraman* non formal melalui inovasi tangan umat sebagai peran Kementerian Agama.

Dari kajian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan yang relevan untuk dieksplorasi lebih lanjut. Pertama, sebagian besar kajian cenderung lebih fokus pada program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, sedangkan peran Kementerian Agama dalam konteks pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah belum terungkap dengan cukup rinci.

Kemudian, gap kajian juga muncul terkait integrasi nilai-nilai agama dalam program pemberdayaan. Meskipun ada kajian yang menyentuh aspek ini, namun belum mendalam terkait dengan bagaimana Kementerian Agama dapat secara spesifik memanfaatkan ajaran agama untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan.

## METODOLOGI

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang peran Kementerian Agama dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.

Data sekunder akan diperoleh melalui pengumpulan kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan kajian ini. Kajian-kajian tersebut akan mencakup berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, laporan riset, dan dokumen resmi terkait peran Kementerian Agama dan pengentasan kemiskinan. Pengumpulan data sekunder ini akan menjadi landasan untuk memahami kerangka kerja, strategi, dan program yang telah diimplementasikan oleh Kementerian

Agama dalam mengatasi kemiskinan di daerah tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, di mana informasi yang ditemukan akan diuraikan secara terperinci untuk menjelaskan peran Kementerian Agama dalam pengentasan kemiskinan.

Dilakukan juga pengumpulan data Kemiskinan Makro: Data kemiskinan makro dari Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh BPS digunakan dalam analisis kuantitatif. Data ini dapat dianalisis dengan menggunakan berbagai teknik statistik.

Pendekatan ini memungkinkan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang dampak dan efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama, serta mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap peran lembaga tersebut dalam upaya pengentasan kemiskinan. Metode deskriptif juga memfasilitasi penjelasan yang mendalam terkait konteks sosial, budaya, dan agama yang dapat memengaruhi hasil kajian. Dengan demikian, metode kualitatif pendekatan deskriptif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang holistik dan kontekstual terhadap peran Kementerian Agama dalam mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia ternyata memiliki tantangan serius dalam mengatasi kemiskinan. Kementerian Agama, sebagai salah satu lembaga pemerintah di Indonesia, memiliki potensi besar untuk berperan dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Profil Kemiskinan di Jawa Tengah berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mengalami fluktuasi seiring waktu, dengan dampak pandemic Covid-

19 yang signifikan. Pada September 2019, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 10,58% yang merupakan angka terendah dalam beberapa tahun terakhir sebelum pandemic. Namun sejak munculnya pandemi, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mulai meningkat. Pada Maret 2020, tingkat kemiskinan naik menjadi 11,41% dan terus meningkat hingga mencapai 11,79% pada Maret 2021. Meskipun ada pemulihan ekonomi yang terlihat pada September 2022 dengan tingkat kemiskinan turun menjadi 10,98%, ini masih di atas tingkat sebelum pandemi.

Pada Maret 2023 tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 10,77% dan di Maret 2024 turun kembali menjadi 10,47% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3,70 juta orang. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam kondisi sosial ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan, perkotaan maupun gabungan keduanya juga mengalami penurunan.

### 2. Pembahasan

Berdasarkan paparan data di atas dapat dikembangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terkait kemiskinan di Jawa Tengah diantaranya :

1. Tingkat pengangguran yang tinggi antara penduduk miskin.
2. Pendapatan yang rendah dari pekerjaan yang tersedia.
3. Pekerjaan yang tidak stabil dan tergantung pada sektor tertentu.

Kementerian Agama memegang peran krusial dalam mengatasi kasus kemiskinan melalui pendekatan berbasis agama. Dengan menjadi penyelenggara dan fasilitator program pendidikan agama, Kementerian Agama berkontribusi dalam membentuk karakter dan moral masyarakat. Pendidikan agama yang diberikan tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai sosial dan keadilan.

Dalam kajian ini, hasil analisis data sekunder mengungkap peran signifikan Kementerian Agama (Kemenag) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jawa

Tengah. Salah satu aspek utama yang muncul adalah keberadaan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah (LAZIS) di Jawa Tengah yang diinisiasi oleh Kemenag. LAZIS menjadi salah satu instrumen penting dalam mengatasi kemiskinan dengan melibatkan masyarakat dalam skema distribusi zakat, infaq, dan sadaqah. Program-program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mempromosikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan solidaritas dalam masyarakat.

Kemenag memainkan peran strategis dalam koordinasi dan implementasi berbagai program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Melalui pendekatan keagamaan, Kemenag berhasil mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika ke dalam kebijakan-kebijakan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. Program pendidikan keagamaan, termasuk pelatihan keterampilan dan workshop etika kerja, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing masyarakat dalam mencari pekerjaan (Rahmad, 2023).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi platform penting yang membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung sesama yang kurang mampu. Distribusi zakat, infaq, dan sadaqah melibatkan proses selektif dan transparan, memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal. Selain itu, LAZ juga turut berperan dalam memberikan pelatihan kewirausahaan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan daya ekonomi mereka (Lubis, Silalahi, & Irama, 2022)

Peran dai yang sebagai tokoh masyarakat karena posisinya sebagai seorang "opinion leader" yaitu orang yang berpengaruh besar dalam mengambil keputusan. Mereka berperan dalam proses meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini adalah kesejahteraan untuk individu maupun kelompok. Peran dai ini juga juga penting dalam memimpin arah pemahaman

masyarakat terutama dalam kesadaran melaksanakan zakat dan wakaf (Widhi, Masruroh, & Achmad, 2023)

Penguatan Kualitas Pelayanan Publik pada Kementerian Agama juga diperlukan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat melalui standar pelayanan yang baik dan budaya pelayanan prima. Dengan pelayanan publik yang prima, diharapkan semua program Kementerian Agama yang terkait dengan bantuan dapat berjalan dengan baik (Sirin, 2021) dan (Darwiyanto, 2021).

Adanya lembaga pendidikan keagamaan yang diinisiasi oleh Kemenag juga menjadi pilar penting dalam pengentasan kemiskinan. Pendidikan keagamaan tidak hanya berfokus pada aspek ritual, tetapi juga mencakup pendidikan karakter, etika, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, masyarakat yang terlibat dalam pendidikan keagamaan diharapkan memiliki landasan moral yang kuat untuk mengatasi tantangan (Wahid, 2023).

Agama juga memainkan peran penting dalam memotivasi individu untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan amil zakat. Nilai-nilai keagamaan seperti kasih sayang, keadilan, dan empati memberikan landasan etika bagi masyarakat untuk saling mendukung. Oleh karena itu, program-program yang diinisiasi oleh Kemenag tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara masyarakat (Andriyani, 2023)

Dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah, Kementerian Agama telah membuat beberapa program dari tahun 2020 s.d. 2024 yaitu (Buku Outlook Kementerian Agama, 2024):

1. Program Kantor Urusan Agama Pemberdayaan Ekonomi Umat (KUA PEU)

Merupakan program pendampingan dan penguatan akses pemberdayaan ekonomi umat berbasis keluarga/komunitas yang terdiri dari pemberian bantuan pemberdayaan ekonomi umat, pelatihan, workshop usaha serta

pendampingan usaha terhadap pengusaha UMKM.

Program ini melibatkan pemberian bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan yang intensif. Dengan demikian, UMKM mustahik dapat memanfaatkan dana yang diberikan untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka, memperluas jangkauan pasar, dan memperbaiki manajemen usaha.

Melalui program pemberdayaan ini, Kemenag menciptakan lingkungan yang mendukung bagi UMKM mustahik untuk tumbuh dan berkembang. Pendekatan ini tidak hanya memberikan bantuan finansial tetapi juga memperhatikan aspek pengembangan kapasitas dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, program ini berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup mustahik, menciptakan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan (Jaya, 2022)

Meskipun program pemberdayaan UMKM mustahik telah memberikan dampak positif, hasil kajian juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah perluasan akses terhadap pelatihan keterampilan dan pendampingan bagi UMKM yang belum terjangkau oleh program pemberdayaan. Peningkatan jangkauan dan intensitas program dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin UMKM mustahik.

## 2. Program Inkubasi Wakaf Produktif

Program yang melibatkan Badan Wakaf Indonesia, lembaga wakaf, lembaga zakat, dan pemerintah daerah. Program ini berjalan dari tahun tahun 2020 dan saat ini sudah ada 46 titik yang dijadikan project pengembangan inkubasi wakaf produktif. Program ini merupakan wahana transformasi pembentukan sumberdaya manusia nazhir menjadi

sumber daya manusia yang mempunyai jiwa usaha yang kreatif. Inovatif dan visioner. Nazhir penerima bantuan akan mendapatkan akses permodalan, pelatihan dan pendampingan.

## 3. Program Kampung Zakat

Merupakan kegiatan Kemenag bersama dengan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Nasional untuk mengataspermasalahan masyarakat yang berhubungan dengan dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial kemanusiaan. Kemenag sebagai koordinator dan didukung menjadi eksekutor dan fasilitator program pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat yaitu pihak BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat. Sasaran program kampung zakat adalah para penduduk desa yang tergolong mustahik dengan kriteria asnaf miskin dan *fisabilillah*.

## PENUTUP

### 1. Simpulan

Menyajikan ringkasan dari uraian hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) memiliki potensi besar untuk berperan dalam mengatasi masalah ini dengan memanfaatkan jaringan keagamaan yang luas dan kedekatan dengan masyarakat Jawa Tengah. Melalui pengembangan program-program sosial yang berfokus pada pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan kolaborasi lintas sektor, Kementerian Agama dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Peran Kementerian Agama dalam mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah melalui pemberdayaan ekonomi umat melalui pemberdayaan UMKM mustahik, Kemenag berhasil memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan

kesejahteraan ekonomi masyarakat. Program pemberdayaan, termasuk bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan distribusi zakat kerja sama dengan BAZNAS dan LAZ, membentuk landasan yang kuat untuk pertumbuhan bisnis kecil dan memberdayakan masyarakat secara ekonomi.

## 2. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan kajian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi umat melalui pemberdayaan UMKM mustahik dan implementasi program zakat dan wakaf oleh Kementerian Agama (Kemenag) dalam mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah :

1. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsep wakaf. Kemenag dapat memperkuat strategi edukasi melalui media sosial, seminar, dan kampanye pemberdayaan ekonomi berbasis agama.
2. Optimalisasi kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta diharapkan dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana wakaf.
3. Perlu pengembangan lebih lanjut terhadap program pemberdayaan UMKM mustahik dengan penekanan pada aspek pelatihan keterampilan dan pendampingan yang berkelanjutan. Kemenag dapat menggandeng lembaga pelatihan dan bermitra dengan pelaku industri untuk menyediakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
4. Penguatan pemantauan dan evaluasi program juga penting untuk memastikan dampak yang berkelanjutan dan perbaikan berkelanjutan. Kesemuanya ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh untuk meningkatkan efektivitas peran Kemenag dalam mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah melalui pemberdayaan ekonomi berbasis agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, R. A. (2023). Penguatan Kebijakan Zakat Profesi; Analisis Indeks Persepsi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 1(3). doi:<https://doi.org/10.61860/jigp.v2i1.57>
- Ariawan, I. P. (2024). Peran Kementerian Agama Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim Di Bali Menggunakan Metode Analisis Swot: Strategi Dan Implikasi Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 2(3). doi:<https://doi.org/10.61860/jigp.v2i3.100>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). Berita Resmi Statistik No.41/07/33/Th.XVIII. Diambil kembali dari <https://jateng.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/1523/kemiskinan-provinsi-jawa--tengah-maret-2024.html>
- Buku Outlook Kementerian Agama. (2024). *Makin Digital Kian Menjangkau Umat*. Diambil kembali dari [https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/upload/files/buku\\_outlook\\_2024.pdf](https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/upload/files/buku_outlook_2024.pdf)
- Darwiyanto. (2021). Survei Indeks Persepsi Korupsi Dan Kepuasan Layanan Balai Litbang Agama Semarang Tahun 2020. *Jurnal Edutrained: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan*, 5(1). doi:<https://doi.org/10.37730/edutrained.v5i1.123>
- Isman, A. F. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Zakat Pada Masa Pandemi Di Desa Kahayya, Kabupaten Bulukumba. *DIMAS: Jurnal Pemikiran Agama dan Pemberdayaan*, 21(2). doi:<https://doi.org/10.21580/dms.2021.212.9319>
- Jaya, T. K. (2022). Potensi Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 1(2). doi:<https://doi.org/10.61860/jigp.v1i2.5>
- Lubis, E. A. (2023). Efektifitas Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Kementerian Agama. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 1(3). doi:<https://doi.org/10.61860/jigp.v1i3.50>
- Lubis, N., Silalahi, A. D., & Irama, O. N. (2022). Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatra Utara. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10). doi:<https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1323>
- Rahmad. (2023). Dampak Pelaksanaan Kebijakan “Kemenag Sultra Bersahabat” Terhadap Penciptaan Kondisi Damai. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 1(3). doi:<https://doi.org/10.61860/jigp.v1i3.12>
- Sastika, M., & Batubara, C. (2023). Peluang Pengembangan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Ekonomi Syariah sebagai Solusi Pembangunan Desa yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2). Diambil kembali dari <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/view/6283/2933>
- Sintasari, B. (2021). Pemberdayaan Remaja Masjid Dan Perannya Dalam Pendidikan Islam. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 10(1). doi:<https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v10i1.251>

- Sirin, A. (2021). Strategi Implementasi Pembangunan Zona Integritas Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Edutrained: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan*, 5(2). doi:<https://doi.org/10.37730/edutrainee.v5i2.156>
- Wahid, L. (2023). Peran Guru Agama Dalam Menanamkan Kesadaran Sosial Pada Siswa Di Sekolah Menengah. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(2). doi:<https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i2.18141>
- Widhi, M. N., Masruroh, I., & Achmad, K. (2023). Penerapan Komunikasi Profetik Dalam Dakwah Inklusif Di Pesantren Waria Al-Fattah Yogyakarta. *Jurnal Edutrained: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan*, 7(2). doi:<https://doi.org/10.37730/edutrainee.v7i2.233>